

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA MELALUI NAVAL DIPLOMACY DAN SEA POWER DI LAUT CINA SELATAN PADA TAHUN 2020

INDONESIAN DEFENSE DIPLOMACY THROUGH NAVAL DIPLOMACY AND SEA POWER IN THE SOUTH CHINA SEA IN 2020

Lutfi Kurniawan

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
lutfi.kurniawan01@ui.ac.id, shofwan.albanna@gmail.com

Dikirim 12 Mei 2023, Direvisi 12 Juni 2023, Disetujui 28 Juli 2023

Abstrak: Implementasi diplomasi pertahanan terutama di wilayah maritim masih menjadi salah satu permasalahan yang ada pada proses diplomasi pertahanan suatu negara. Terdapat pemahaman akan strategi diplomasi pertahanan yang masih terlalu luas di wilayah maritim suatu negara, yaitu diplomasi maritim (*maritime diplomacy*) sehingga pelaksanaan diplomasi pertahanan di wilayah kelautan atau maritim suatu negara masih belum efektif. Studi-studi terdahulu memaparkan bahwa *maritime diplomacy* adalah suatu strategi dalam diplomasi pertahanan di wilayah maritim yang sangat luas dan identik dengan penggunaan aktor-aktor militer saja, sedangkan *naval diplomacy* merupakan diplomasi pertahanan di wilayah maritim yang juga melibatkan *non-military actors*. Melengkapi studi-studi sebelumnya, argumentasi dalam penelitian ini adalah *naval diplomacy* merupakan konsep diplomasi pertahanan di wilayah maritim yang lebih efektif diterapkan dibandingkan *maritime diplomacy*. Studi ini secara khusus menggambarkan strategi diplomasi pertahanan di wilayah maritim Indonesia yang bersinggungan dengan wilayah Laut Cina Selatan yang menggunakan strategi *naval diplomacy* menurut Ken Booth. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber dalam jaringan seperti berita dan penelitian sebelumnya mengenai diplomasi pertahanan. Hasil dari penelitian ini adalah strategi diplomasi pertahanan maritim dengan *naval diplomacy* dan *sea power* merupakan strategi diplomasi pertahanan maritim di Laut Cina Selatan bagi Indonesia lebih efektif untuk diterapkan karena melibatkan proses negosiasi yang juga melibatkan *non-state actors*. Tetapi, model diplomasi ini belum dapat efektif dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2020 lalu.

Kata kunci: diplomasi pertahanan, *naval diplomacy*, *sea power*

The implementation of defense diplomacy specifically in the maritime area is still a problem that lies on diplomacy process within one state. There is still a too-wide understanding of defense diplomacy defense strategy itself in state's maritime area, especially in the maritime diplomacy. Thus, the implementation of defense diplomacy within maritime area of the state is still inadequate and ineffective. Previous studies show that maritime diplomacy is a strategy within defense diplomacy that is not specific, too wide; involving the only usage of military actors; meanwhile naval diplomacy is one of the defense diplomacy concepts that also involves non-military actors. In completing previous studies, the researcher argues that naval diplomacy is a defense diplomacy concept that is way more effective to be implemented in the maritime area of one state compared to maritime diplomacy. The naval diplomacy is also can be more effective if it is applied in Indonesia's defense diplomacy. This study specifically pictures the Indonesia's defense diplomacy strategy within its maritime area that intersects with the South China Sea (SCS) area in which naval diplomacy strategy is used according to Ken Booth. This study uses qualitative method, data are gathered through secondary data including news and previous studies about defense diplomacy. Result of this study is the naval diplomacy and sea power, as one of defense diplomacy concept, is an effective strategy to be applied in Indonesia's maritime area that intersects with SCS since naval diplomacy also involves negotiation process with the non-state actors. Unfortunately, this strategy is still not effective yet to be implemented in Indonesia back in 2020.

Keywords: defense diplomacy, *naval diplomacy*, *sea power*

PENDAHULUAN

Ruang maritim, secara historis, sudah menjadi sebuah arena dari pencarian kekuatan oleh banyak negara (*power*

struggle). Hal ini disebabkan oleh, ruang lingkup maritim merupakan arena yang dapat menjadi sarana untuk perang, sarana untuk menaklukkan, mengalahkan, dan berbagai sarana persaingan lainnya dalam

kaca mata hubungan internasional antarnegara. Untuk itu, salah satu cara untuk membangun kestabilan yang ada di wilayah kelautan dan maritim, dibutuhkan intervensi dari berbagai pihak sehingga kestabilan internasional pun tetap terjaga. Krisis keamanan suatu negara biasanya tidak hanya bergantung pada bagaimana negara tersebut merespon terhadap ancaman-ancaman dari luar seperti radikalisme yang menyebabkan terorisme (Aminah, 2016) tetapi juga bergantung pada upaya negara untuk menjaga wilayah kemaritimannya. Salah satu cara untuk membangun kestabilan regional maupun internasional itu adalah, menyediakan *navies* atau angkatan laut. Pembangunan dan pengerahan angkatan laut juga merupakan salah satu cara untuk melindungi kepentingan nasional suatu negara, dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan militer negara tersebut (Medeiros dkk, 2017). Selain itu, *navies* atau angkatan laut dan kekuatan angkatan laut lainnya yang tidak hanya identik dengan angkatan laut secara personil (pasukan), yang kemudian juga biasa disebut sebagai *naval forces* juga memiliki peran yang sifatnya instrumental. *Naval forces* memiliki fungsi yang koersif, sehingga memungkinkan berbagai peperangan antar-negara juga terjadi di wilayah maritim, yang dilakukan oleh masing-masing angkatan laut yang dimiliki oleh negara.

Akan tetapi, apabila ada suatu kesepakatan untuk meraih kepentingan bersama yang dimiliki antar-negara yang memiliki wilayah laut yang bersinggungan, justru wilayah maritim ini bisa menjadi sarana untuk membangun hubungan diplomasi yang baik, dan mencegah terjadinya perang di wilayah maritim yang bersinggungan tersebut. Dengan kata lain, hal ini juga merupakan sebuah paradoks – bahwa di sisi lain, angkatan laut, peralatan kekuatan alat-alat perang yang biasanya digunakan untuk menghadapi perang di laut, yang dimiliki oleh suatu negara – justru menjadi sebuah “alat” diplomasi yang dapat

mendukung terjadinya ikatan positif antarnegara yang kuat dalam berbagai isu. Di sisi lain, kekuatan-kekuatan maritim yang dimiliki oleh negara itu justru dapat menjadi alat untuk membangun hubungan diplomasi daripada mengancam keberadaan negara mereka masing-masing (Medeiros dkk, 2017).

Melihat hal yang telah disebutkan di atas, kekuatan-kekuatan yang ada di laut dan merupakan pengejawantahan berbagai kekuatan militer yang ada pada masing-masing negara untuk melindungi wilayahnya, menyebabkan hal ini menjadi sebuah hal yang penting untuk mencegah terjadinya konflik yang akan muncul apabila tidak ada kooperasi atau kerja sama yang terjalin antarnegara di wilayah lautnya yang bersinggungan. Oleh karena itu, Booth (1977) melihat bahwa angkatan laut dan pasukan di dalamnya, memiliki tiga fungsi, yakni: (1) militer, (2) diplomatis, dan (3) fungsi yang dapat memancing terjadinya pembentukan kebijakan tertentu yang akan diikuti oleh negara-negara yang terlibat di dalamnya atau *policing*. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh angkatan laut yaitu diplomasi inilah yang dapat digunakan untuk mendukung proses negosiasi wilayah maritim yang bersinggungan bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya (Medeiros dkk, 2017).

Booth juga memaparkan bahwa angkatan laut dapat digunakan sebagai alat untuk menegosiasikan posisi geopolitik negara terutama wilayah lautnya; kemudian juga dapat digunakan pemerintah masing-masing negara untuk menghadapi ancaman yang memungkinkan untuk muncul di wilayah maritim; lalu juga dapat mengonstruksikan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing negara sebagai sebuah pesan terselubung atau *subliminal message* agar negara-negara yang terlibat dalam wilayah laut yang bersinggungan paham bahwa masing-masing negara memiliki *power*-nya sendiri, dan juga untuk membangun reputasi dari negara itu sendiri. Dalam konteks ini, menurut Booth,

diplomasi yang terkait dengan kekuatan maritim ini perlu dilakukan (Booth, 1977).

Selain itu, Till (1994) memaparkan bahwa *navies* atau angkatan laut juga merupakan aspek penting yang dapat menentukan kooperasi yang ada di wilayah maritim yang bersinggungan. Till memaparkan bahwa kekuatan angkatan laut akan sangat berdasarkan pada: perang melawan lawan atau musuh (negara yang menjadi musuh) kuat dan dengan negara yang lebih lemah; kemudian *naval diplomacy* yang dapat diterapkan secara koersif untuk membentuk aliansi atau menyediakan “bantuan” secara internasional, dan kestabilan order atau situasi dalam wilayah maritim (Till, 1994).

Diplomasi pertahanan di wilayah maritim juga penting untuk dilakukan karena seperti yang telah dipaparkan oleh Chapsos dan Kitchen (2015), keamanan maritim merupakan salah satu area yang paling penting dalam meningkatkan kestabilan dan keamanan suatu negara secara utuh. Hal ini disebabkan oleh walaupun teknologi telah meningkatkan berbagai sarana dan prasarana manusia dalam berkomunikasi dan mengurangi jarak dalam dunia internasional, tetap saja 70% komposisi dari dunia secara keseluruhan diisi oleh wilayah maritim dan kelautan; dan perdagangan internasional masih menjadi hal yang paling bergantung pada wilayah maritim atau kelautan yang mengelilingi suatu negara (Chapsos dkk, 2015). Selain itu, diplomasi pertahanan juga akan menghasilkan kerja sama antarnegara dalam bentuk kebijakan pertahanan juga akan menghasilkan kerja sama antarnegara dalam bentuk kebijakan luar negeri dalam konteks pengaturan armada angkatan laut dan personil angkatan laut di wilayah maritim yang bersinggungan, sehingga hal ini dapat mereduksi ketegangan di wilayah maritim yang bersinggungan dan meningkatkan kestabilan internasional (Booth 1977; Bradford 2005; Chapsos & Kitchen, 2015). Dalam penelitian ini, akan dibahas

mengenai pentingnya diplomasi pertahanan dengan konsep sea power dan naval diplomacy.

Pada implementasinya, konsep ini sering sekali berkaitan dengan konsep maritime diplomacy. Dalam tulisan ini, penelitian akan lebih berfokus pada penggunaan konsep naval diplomacy. Justifikasi penulis menggunakan konsep naval diplomacy daripada menggunakan konsep maritime diplomacy, didukung dengan penelitian oleh La Miere (2014) yang memberikan penjelasan signifikan tentang perbedaan naval diplomacy dan maritime diplomacy. Naval diplomacy merupakan diplomasi yang juga melibatkan *non- military actors* dalam proses diplomasi dan negosiasi untuk menjaga kestabilan di wilayah laut yang bersinggungan, sedangkan *maritime diplomacy* adalah diplomasi pertahanan kelautan yang berfokus pada *military actors* saja atau aktor-aktor militer. Sehingga, *naval diplomacy* dalam berbagai belahan dunia, memiliki peran yang relevan dan memberikan efek diplomatis seperti pelayanan negara atau pemerintahan negara yang sedang ada pada konteks dan ruang waktu tertentu (La Miere, 2014).

Kajian Literatur & Landasan Teori: *Naval Diplomacy & Sea Power*

Beberapa literatur yang telah dikumpulkan pada dasarnya sudah menjelaskan mengenai diplomasi pertahanan yang ada di wilayah laut atau maritim, namun hal ini masih menjelaskan diplomasi pertahanan yang berfokus pada diplomasi maritim. Butler (2005) menjelaskan bahwa diplomasi maritim dapat dilakukan untuk memberikan efek “getaran” dan “gertakan” di dunia internasional sehingga dapat memberikan sebuah gertakan simbolis bahwa suatu negara memiliki kekuatan yang kuat di wilayah maritimnya. Hal ini selaras dengan definisi yang dipaparkan oleh Miere yang membandingkan diplomasi pertahanan

secara maritim dan *naval diplomacy* bahwa, diplomasi maritim merupakan bentuk diplomasi yang erat dan identik kaitannya dengan diplomasi militer dan angkatan perang laut. Tidak seperti *naval diplomacy* yang juga melibatkan non-military actors dalam melakukan diplomasi pertahanan untuk menjaga kestabilan wilayah laut yang bersinggungan atau bahkan menjadi sengketa. Disebutkan juga oleh Butler bahwa diplomasi pertahanan maritim ini sifatnya koersif karena proses diplomasi berdasarkan *military actors* yang melakukan serangan-serangan tertentu dengan berbagai peralatan angkatan laut suatu negara (Butler, 2005).

Literatur berikutnya adalah oleh Sirmareza (2017). Dalam penelitian tersebut, dipaparkan bahwa dalam konteks diplomasi pertahanan, Indonesia sudah pernah melakukan diplomasi pertahanan dengan *naval diplomacy* untuk berkontribusi dalam perdamaian dunia di konflik Lebanon. Indonesia mengirimkan Satgas Maritim TNI untuk menjaga mandat perdamaian dunia secara konstitusi Indonesia dalam UUD 1945, juga ingin mewujudkan peran Indonesia sebagai *middle power* atau kekuatan yang dapat menengahi. Penerapan *naval diplomacy* yang dilakukan adalah pengiriman Satgas Maritim TNI, yang mana pengiriman angkatan perang seperti ini relevan dengan salah satu aspek sudut pandang yang ada pada *naval diplomacy* yaitu *appropriateness* (kualitas dan kapabilitas), seperti yang dipaparkan oleh Booth (1977). Indonesia sudah dapat mewujudkan fungsinya sebagai agen perdamaian dunia dalam konteks konflik Lebanon ini. Kemudian, dipaparkan pula bahwa dari aspek politik, menurut tulisan ini, Satgas Maritim TNI dalam derajat yang beragam ternyata juga mendukung agenda politik luar negeri Indonesia yang berperan sebagai *peacekeeping leader*, kemudian Indonesia juga yang memiliki agenda politik luar negeri Indonesia, sehingga perannya dalam PBB adalah anggota tidak tetap. Namun, penerapan *naval diplomacy* dari aspek

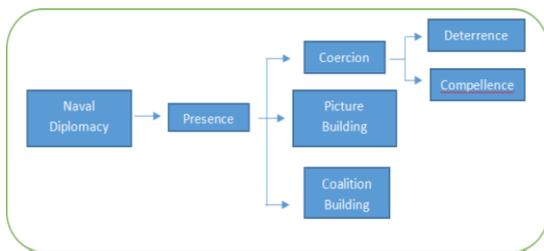
simbolisme yang ada di dalam konsep ini, dalam tulisan ini, menurut penulis belum dapat menjadi hal yang signifikan dalam konteks resolusi konflik Lebanon. Hal ini dikarenakan kuantitas Satgas Maritim TNI belum lebih optimal dari segi jumlah, sehingga penyelesaian atau resolusi konflik di Lebanon belum terbantu secara signifikan oleh Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih melihat penerapan *naval diplomacy* dan *sea power* yang ada di konteks studi Kawasan yang berbeda yakni di Laut Cina Selatan sebagai bentuk diplomasi pertahanan; apakah efektif, atau justru sebaliknya.

Naval Diplomacy

Seperti yang sudah dipaparkan di bagian pendahuluan sebelumnya, *naval diplomacy* merupakan sebuah konsep yang mengusung diplomasi pertahanan dengan menggunakan salah satu kekuatan yang menjamin pertahanan negara di wilayah lautnya, yakni dengan menggunakan kekuatan angkatan laut atau navies. Booth (2014) memaparkan bahwa ada tiga fungsi utama yang dapat dimiliki oleh kekuatan maritim atau laut yang dimiliki suatu negara yakni Military, Constabulary, dan Diplomacy. Seperti yang juga sudah dipaparkan di atas, penjelasan mengenai *naval diplomacy* juga tak luput dari penjelasan salah satu penterori pengkajian strategis dan wilayah yaitu Geoffrey Till (2009).

Till memaparkan bahwa *naval diplomacy* dalam penerapannya memiliki tahapan-tahapan, yakni presence, coercion/picture, building/coalition building, dan unsur yang lebih lanjut dari coercion, yakni deterrence. Seperti literatur yang telah dijelaskan di atas, sebenarnya Indonesia sudah pernah melakukan proses *naval diplomacy* dalam konteks pengiriman armada ke konflik Libanon, namun belum sepenuhnya proses tersebut berjalan dengan efektif. Maka, dalam penelitian ini, penulis akan melihat sudah sejauh mana proses

naval diplomacy namun dalam konteks kasus yang berbeda yakni pada dinamika Laut Cina Selatan; apakah proses naval diplomacy yang ada di Indonesia sebagai salah satu strategi diplomasi pertahanan, sudah berjalan dengan sebagaimanamestinya. Proses *naval diplomacy* seperti yang dipaparkan oleh Till (dalam Agastia, 2016) adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Operasionalisasi Konsep Naval Diplomacy sebagai Sebuah Konsep Prosesual

Melihat konsep dan tahapan naval diplomacy yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini akan melihat sejauh mana berbagai tahapan yang ada pada diagram tahapan naval diplomacy tersebut sudah diimplementasikan dengan baik dalam konteks Diplomasi Pertahanan di Laut Cina Selatan, yang dilakukan oleh Indonesia.

Sea Power

Konsep sea power yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai salah satu hal yang mempengaruhi terjadinya diplomasi pertahanan di wilayah laut yang bersinggungan dengan banyak negara adalah sea power yang dikemukakan oleh Mahan (1987). Dalam tulisannya, Mahan memaparkan bahwa yang membuat laut menjadi sebuah arena yang bermuatan politik disebabkan oleh warga dunia yang memilih untuk melewati beberapa garis dan wilayah laut tertentu daripada wilayah laut yang lainnya; atau yang juga biasa disebut sebagai rute perdagangan laut.

Dalam konteks ini, akhirnya, sebuah kontrol yang ada pada laut juga

harus mencakup control atau pengawasan yang ada pada rute-rute tertentu tersebut. Sehingga, akhirnya, untuk mewujudkan kontrol-kontrol itu (yang juga diperlukan karena wilayah laut merupakan wilayah yang tidak akan lepas dari ancaman internasional dalam berbagai bentuk, harus ada sebuah bentuk kerja sama yang dapat diwujudkan dengan bentuk adanya negara yang dijadikan negara transit, yang menjadi kesepakatan bersama agar hubungan antaregara terus dapat berjalan dengan baik (karena memiliki wilayah strategis yang telah disepakati bersama, untuk dijadikan wilayah transit, sehingga dapat saling memanfaatkannya). Oleh karena itu, konsep sea-power juga dapat dipahami sebagai sebuah kapabilitas yang dimiliki oleh negara untuk mengawasi atau mengontrol wilayah yang tidak hanya mencakup atau meliputi jalur perdagangan laut saja, tetapi juga segala wilayah laut yang ada di sekelilingnya (Bela, 2020).

Till juga memaparkan lagi mengenai konsep sea power yang menurutnya dibagi menjadi dua bagian tahapan, yakni tahapan input dan output (Till, 2009). Dalam implementasinya, konsep sea power sebagai input lebih kepada mencakup hal-hal yang dapat menghasilkan power atau kekuatan di wilayah maritim, di mana menurut Till, kekuatan di wilayah maritim ini juga dapat diperoleh melalui kekuatan angkatan laut. Akan tetapi, menurut Till, kekuatan angkatan laut ini juga harus didukung lagi dengan enam konstituen yang terdiri dari populasi suatu wilayah, masyarakat dan pemerintah, wilayah geografis, teknologi, sumber daya, ekonomi maritim, dan berbagai aspek lainnya. Kemudian, sea power sebagai output adalah ketika wilayah laut ini dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk mempengaruhi perilaku dari orang-orang atau hal-hal yang memang banyak melakukan aktivitas di wilayah laut. Dalam hal ini, akhirnya, penjelasan Till mengenai sea power tidak hanya mengerucutkan dan menspesifikkan pada peran laut yang hanya akan ada dan menjadi sebuah kekuatan

karena adanya suatu perintah dari pihak-pihak yang memiliki power saja, melainkan lebih dari itu. Laut dengan segala isinya memiliki kemampuan atau kapabilitas sebagai wilayah ekspedisi, sebagai sarana *naval diplomacy*, dan sebagai sarana untuk menjaga good order dan stabilitas yang ada di wilayah maritim itu sendiri. Sehingga, menurut Till, sea power mencakup hard power dan soft power (Till, 2009).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, perlu adanya pemahaman mengenai sea power yang dimiliki oleh Indonesia untuk melihat lebih lanjut dinamika diplomasi pertahanan dengan *naval diplomacy* dan berbagai aspek-aspek yang ada di dalamnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, di mana pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menginterpretasi dan memahami makna yang ada pada individu maupun kelompok, terhadap suatu fenomena yang menjadi objek penelitian (Creswell, 2014). Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika diplomasi pertahanan di Indonesia, khususnya pada wilayah Laut Cina Selatan, ditinjau dari aspek-aspek yang ada pada konsep *naval diplomacy* dan *sea-power*. Selain itu, pengumpulan data pada penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder mengenai dinamika Laut Cina Selatan ditinjau dari konteks historis, kemudian dinamika berbagai kerja sama yang akhirnya menghasilkan kebijakan diplomasi pertahanan yang sudah pernah ada sejak dahulu.

Teknik pengumpulan data dengan data sekunder tersebut selanjutnya akan data yang akan diolah menggunakan konsistensi internal yang dapat ditunjukkan dari kemampuan penulis dalam mengevaluasi data secara cermat melalui berbagai bentuk bukti dari berbagai data sekunder mengenai mekanisme diplomasi pertahanan di Indonesia utamanya pada konteks Laut

Cina Selatan dan disesuaikan dengan pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini (termasuk di dalamnya, aspek-aspek yang ada pada konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yakni *naval diplomacy* dan *sea-power*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Indonesia yang merupakan negara kepulauan, memiliki berbagai sumber daya laut dan wilayah laut yang masuk juga ke wilayah teritorialnya, dalam hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif berpartisipasi dalam pembentukan *global maritime governance* sebagaimana yang dipaparkan dalam UNCLOS, mengenai berbagai partisipasi aktif Indonesia dalam hubungan maritim dengan negara-negara lain yang ada di kawasannya. Hal ini juga membuat Indonesia bukan sekadar negara kelautan atau kepulauan, akan tetapi juga membuat Indonesia sebagai “pemain” signifikan dalam aspek kemaritimannya karena memiliki *power* dengan wilayah kemaritimannya itu (Djalal, 1979; Kusumaatmadja, 1978).

Kemudian, Cina adalah salah satu negara yang bersinggungan wilayah lautnya dengan Indonesia. Mengingat Cina juga bersinggungan wilayah maritimnya dengan Indonesia, hal ini membuat Cina akhirnya perlu untuk mengamankan sumber daya kelautan yang dimilikinya karena banyak kapal yang juga mengangkut barang-barang produksi ke Cina melalui wilayah-wilayah laut yang bersinggungan tersebut (Malik, 2014). Selama dua dekade terakhir, Cina memiliki fokus terhadap wilayah laut yang ada dekat dengan wilayah mainland atau daratannya yaitu Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan (Samudera Pasifik Barat). Fokus terhadap wilayah laut yang dimiliki oleh Cina ini ternyata mengalami ekspansi, dengan Cina yang banyak memiliki fokus untuk mengamankan kekuatan regional maritinya

juga di wilayah Samudera Hindia pada satu dekade terakhir ini (Xinhua, 2015).

Hubungan Indonesia-Cina sendiri terletak pada wilayah Laut Cina Selatan yang di dalamnya juga terdapat banyak hubungan yang kompleks, sehingga banyak menghasilkan berbagai ketegangan di antara negara-negara yang bersinggungan wilayah lautnya. Wilayah laut Cina Selatan adalah sekitar 1.3 juta meter persegi yang diklaim oleh Cina, sehingga menimbulkan berbagai ketegangan. Wilayah ini meliputi Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan (Singh, 2012). Insiden terbaru yang melibatkan berbagai negara ini juga terjadi yang melibatkan perilaku kapal Cina di wilayah sengketa antara Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Indonesia merespon dengan memanggil duta besar Cina untuk mengeluarkan dan melaksanakan proses diplomatik yang resmi. Selanjutnya, respon Indonesia yang lebih teknis adalah dengan TNI yang mengerahkan sepuluh kapal angkatan laut ke wilayah persengketaan, dan juga empat pesawat tempur F-16 yang ada di wilayah Kepulauan Natuna. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga bahkan langsung turut mengawasi dengan meninjau lokasi secara langsung. Pada minggu pertama tahun 2020, akhirnya kapal angkatan laut penjaga pantai Cina dan kapal angkatan laut Indonesia terjebak dalam suatu “kebuntuan” dalam hubungan yang berselisih ini, mengingatkan pada perselisihan sebelumnya yang ada di antara Cina, Filipina, dan Vietnam selama sepuluh tahun atau satu dekade terakhir ini (Felix, 2021).

Nota diplomatik ini dikirimkan pada Mei 2020 (Channel News Asia, 2021), untuk menolak klaim Beijing, Cina, yang mengklaim bahwa hak-hak kemaritimannya dan kepentingannya di Laut Cina Selatan adalah merupakan kepentingan yang sudah resmi kuat karena tertuang dalam *UN Convention on the Law of the Sea* (Felix, 2021). Perselisihan di antara Indonesia-Cina utamanya dalam memperebutkan wilayah Laut Cina Selatan

bukanlah yang pertama kali, namun langkah yang diambil oleh Indonesia pada Mei 2020 lalu, merupakan langkah pertama (untuk mengirimkan nota diplomatik) kepada PBB yang dilakukan oleh negara ASEAN. Langkah ini juga dilakukan untuk menentang klaim Cina tersebut secara keras (Felix, 2021). Dinamika hubungan Indonesia-Cina yang berselisih seperti ini, meskipun pada Mei 2020 lalu menandakan bahwa Indonesia tergolong agresif dan keras terhadap Cina, tidak serta merta akan sukses untuk diterapkan mengingat ketergantungan Indonesia terhadap Cina (Felix, 2021).

Dari segi hubungan militernya, seringkali dipaparkan bahwa tidak ada perselisihan wilayah teritorial antara Indonesia dan Cina (Suryadinata, 2020). Akan tetapi, fakta berkata lain. Pada dasarnya memang tidak ada perselisihan wilayah *mainland* atau daratan antara Indonesia dan Cina, akan tetapi perselisihan itu terlihat kentara pada wilayah kemaritimannya (FPRI, 2021). Hal ini terlihat kentara juga karena baru-baru ini, pada bulan Desember 2019, kapal dari Cina yang mengawal beberapa kapal penangkap ikan Cina, ternyata memasuki wilayah perairan yang berada di *nine-dash line* yang bahkan diproklamirkan, dan dideklarasikan sendiri oleh Cina; tetapi wilayah *nine-dash line* ini juga berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang ada di Indonesia dekat dengan wilayah Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan (FPRI, 2021).

Lebih lanjut, pada Juli 2020, angkatan laut di Indonesia juga akhirnya melakukan latihan empat hari di wilayah Laut Cina Selatan sebagai respon dari klaim Cina yang kembali muncul pada saat itu. Hal ini menjadi respon tersendiri dari Indonesia dalam melakukan diplomasi pertahanannya terhadap Cina. Dua puluh empat kapal perang akhirnya juga ikut berpartisipasi dalam latihan ini, termasuk kapal perusak rudal dan kapal pengawas atau pengawak. Pelatihan ini tepatnya dilakukan di wilayah Kepulauan Natuna;

seperti yang disebutkan di atas tadi bahwa wilayah ini merupakan wilayah yang bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) dengan nine-dash line yang diprakarsai dan diproklamirkan oleh Cina sendiri (Jibiki, 2021).

Pelatihan ini tetap dilakukan oleh Indonesia walaupun pandemi COVID-19 masih ada dan belum terselesaikan, ujar Laks. Ahmadi Heri Purwono, selaku Wakil Kepala Staf Angkatan Laut. Hal ini juga tetap dilakukan karena disinyalir, Cina akan menggunakan Bahkan, Amerika Serikat juga menyatakan sikap yang tidak menyetujui klaim Cina ini dan menyatakan keberpihakannya dengan berbagai negara di Asia Tenggara yang menjadi sekutunya (Moriyasu & Khan, 2021).

Secara historis, meskipun banyak ketegangan dan perselisihan di antara Indonesia- Cina, sudah banyak upaya diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Cina. Seperti pada tahun 2018 misalnya, Presiden Joko Widodo memandatkan Jendral Indonesia sebagai atase pertahanan di kedutaan besar Indonesia yang ada di Beijing, Cina, untuk yang pertama kalinya semenjak adanya hubungan Indonesia-Cina.

Selain itu, berkaitan dengan diangkatnya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan Indonesia di tahun 2019, Cina salah satu negara yang memiliki *major power* pertama yang dikunjungi oleh Indonesia langsung oleh Menteri Pertahanan terpilih, Prabowo Subianto. Selama masa kunjungannya itu, Prabowo Subianto bertemu dengan Jenderal Wei dan Komisi Militer yang ada di Cina, diwakilkan oleh Jenderal Xu Qiliang sebagai *chairman* dari komisi tersebut. Hal ini dilakukan Indonesia dalam rangka untuk mendiskusikan kerja sama pertahanan sebagai bentuk diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia, sehingga kerja sama dalam bidang militer-pertahanan tetap dapat terjalin walaupun secara historis pula, banyak ketegangan dan perselisihan yang

terjadi di antara Cina dan Indonesia, utamanya di wilayah konfliktual Laut Cina Selatan (Felix, 2021).

Saat ini, diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Cina, utamanya pada masa pandemi COVID-19 ini, dilakukan oleh Indonesia dengan menerima berbagai bantuan kesehatan dan ketersediaan alat-alat kesehatan juga yang berasal dari Cina. Secara kronologis, diplomasi pertahanan yang ada karena hubungan Indonesia-Cina di masa pandemi ini, terlaksana dalam konteks teknis dengan adanya pesawat hercules Indonesia jenis Air Force C-130 yang mengangkut sebanyak 8 ton keperluan kesehatan dan kedokteran dari Cina pada tanggal 23 Maret 2020 lalu.

Selain itu, praktik diplomasi pertahanan ini juga menghasilkan Cina dengan *military aircraft*-nya membawa berbagai keperluan kedokteran dan kesehatan juga dan mendarat di Indonesia, tempatnya di Jakarta pada 12 Mei 2020 lalu. Kemudian kerja sama dari adanya diplomasi pertahanan yang sebelumnya dilakukan juga ditunjukkan oleh data yang memaparkan bahwa di akhir 2019 lalu, dilaporkan bahwa Indonesia berencana untuk menggelontorkan 200 juta dolar AS untuk membeli berbagai alat kapal perang dan pengawas dari Cina, walaupun pada akhirnya pembelian tersebut harus dibatalkan karena adanya kontrol dan tekanan besar dari major power lain yaitu Amerika Serikat.

Dependensi Indonesia terhadap Cina ini akhirnya yang menyebabkan bahwa Indonesia masih harus terus melakukan diplomasi pertahanan terhadap Cina—walaupun sudah banyak konflik, perselisihan, atau ketegangan yang terjadi di antara keduabelah pihak—terutama terutama di wilayah Laut Cina Selatan, karena Cina juga sekarang tumbuh menjadi negara yang memiliki angka pertumbuhan paling besar dalam perkembangan juga pemutakhiran, pemodernan kapabilitas dan alat-alat militernya di dunia.

Pertumbuhan kapabilitas pertahanan Cina ini juga ditunjukkan oleh data berikut (IISS, 2021):

Gambar 2. Kapabilitas Militer Cina, Amerika

Country	Active navy personnel	Principal surface combatants	Submarines				
			Attack	Ballistic-missile	Nuclear-powered ballistic-missile	Nuclear-powered attack	Nuclear-powered guided-missile
China	260,000	80	46	1	6	6	-
US	346,500	124	-	-	14	3	51
UK	33,050	21	-	-	4	7	-
France	34,700	22	-	-	4	4	-
Germany	16,600	10	3	-	-	-	-
Netherlands	7,350 (incl. marines)	6	4	-	-	-	-
Spain	20,350 (incl. aviation and marines)	11	2	-	-	-	-

Source: IISS Military Balance+ database

Serikat, dan Beberapa Negara di Eropa 2020

Dari data tersebut, terlihat bahwa Cina masih menjadi negara kedua yang memimpin dalam ketersediaan personel militer dan angkatan perangnya, setelah Amerika Serikat. Cina berada di posisi kedua dengan jumlah angkatan perang sebanyak 260.000 personel, di bawah AS yang memiliki 346.000 personel angkatan perang. Angka yang dimiliki oleh Cina ini meningkat drastis meskipun masih berada di bawah Amerika Serikat, setidaknya data tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas militer Cina terus menerus naik (IISS, 2021).

Hal ini juga menunjukkan bahwa Cina diprediksi akan menjadi salah satu aktor keamanan global dan internasional terkuat selain Amerika bila angka ini terus menerus naik (IISS, 2021). Selain dari data yang menunjukkan banyaknya angkatan perang dan kapabilitas militer Cina yang naik tersebut, kerja sama NATO, Cina, di wilayah Indo-Pasifik juga menunjukkan bahwa banyaknya negara yang menjalin kerja sama keamanan internasional/strategik untuk mengamankan wilayahnya. Berikut adalah peta yang menunjukkan Cina beserta berbagai *partner* kerja sama di wilayah Indo-Pasifik per November 2020:



Gambar 3. Kerja sama Cina dengan negara lain, kerja sama NATO dengan negara lain, serta *both partners* atau negara-negara yang menjalin kerja sama baik dengan NATO maupun Cina (IISS, 2021).

Dengan beberapa penjelasan di atas, meskipun Indonesia-Cina mengalami berbagai gejolak dalam hubungan terutama hubungan militernya yang ada pada wilayah maritim seperti di wilayah Laut Cina Selatan, diplomasi pertahanan wilayah maritim dari Indonesia terhadap Cina tetap harus dilakukan dengan *naval diplomacy* untuk tetap menjalin kerja sama bilateral dan membina hubungan baik karena Indonesia juga masih bergantung dengan Cina dalam berbagai aspek. Selain itu, potensi Cina yang juga akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan, dan kapabilitas militer kuat karena secara konstan terus menerus memiliki teknologi yang dapat memutakhirkan dan memodernisasi keperluan perangnya, maka diplomasi pertahanan juga tetap harus dilakukan agar Cina tidak menjadi hegemon yang dapat menjadi threat bagi Indonesia (IISS, 2021).

Diplomasi Pertahanan *Naval Diplomacy* di Berbagai Negara

Naval diplomacy yang telah disebutkan di atas, sudah ditetapkan di berbagai negara selain Indonesia. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang juga menerapkan naval diplomacy bagi diplomasi wilayah keluatannya (Rowlands, 2012). Selain itu, setelah era perang dingin, Inggris dan Royal Navy nya juga

menerapkan naval diplomacy untuk praktik diplomasi pada diplomasi pertahanan di wilayah kelautannya sejak tahun 1990an (Rowlands, 2015). Pada saat itu, Inggris bahkan mempublikasikan doktrin mengenai diplomasi pertahanannya untuk mengakui keberadaan praktik naval diplomacy sebagai strategi diplomasi kemaritimannya. Hal ini dinyatakan oleh Eric Grove (Grove) dalam British Maritime Doctrine, pada saat itu:

“Kami tidak puas dengan konsep juga taksonomi dari adanya Gunboat Diplomacy yang merupakan konsep sebelum adanya naval diplomacy, untuk tujuan-tujuan doktrin militer Inggris, sehingga kami mengadopsi konsep naval diplomacy dalam diplomasi maritime yang lebih meliputi beberapa aspek penting dalam diplomasi pertahanan yaitu presence, symbolic use, coercion, dan preventive, precautionary, dan pre-emptive process.”¹

Selain Amerika Serikat dan Inggris, Kanada juga menerapkan doktrin diplomasi pertahanan dengan naval diplomacy ini karena Kanada menganggap bahwa gunboat diplomacy, konsep sebelum adanya naval diplomacy ini, merupakan konsep yang merendahkan dan tidak dapat meliputi banyak aspek penting yang ada di dalam diplomasi pertahanan di wilayah kemaritiman; sehingga sama seperti Inggris, Kanada juga lebih memilih untuk menerapkan praktik diplomasi pertahanan yang meliputi agenda mencegah (preventive deployments), koersif (coercion), dan juga hal-hal yang bersifat simbolik untuk menggertak dan memberikan efek deterrence di wilayah laut atau maritim (symbolic use) (Canada, 2020).

¹ Selama sepuluh tahun masa Perang Dingin, angkatan perang Amerika Serikat menunjukkan bahwa diplomasi kemaritiman ini merupakan konsep yang terus-menerus dievaluasi dan dinilai, dalam beberapa karya ilmiah seperti Naval Policy Book (1992), From The Sea (1992), Naval Warfare (1994), Forward..from the Sea

Lebih lanjut, selain beberapa negara di atas seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada yang menerapkan naval diplomacy, praktik diplomasi pertahanan di wilayah kelautan berupa naval diplomacy ini juga diterapkan di Cina. Penerapan naval diplomacy ini makin banyak diterapkan setelah masuk ke dalam abad ke dua puluh satu, bukan hanya karena adanya hegemon global yang sedang menguasai, dan kemudian menerapkan naval diplomacy, kemudian diikuti juga oleh negara-negara lain.

Penerapan praktik naval diplomacy yang semakin pesat ini dipaparkan oleh Malcolm Murfett, salah satu peneliti yang mempertanyakan apa sebenarnya signifikansi dari penggunaan praktik naval diplomacy jika dibandingkan dengan praktik diplomasi pertahanan maritim lainnya, yakni sebagai berikut:

“Satu dari sekian banyak alasan mengapa naval diplomacy masih memiliki relevansi dengan dunia modern adalah karena naval diplomacy dapat digunakan dalam berbagai kesempatan atau peristiwa yang luas cakupannya, dan meskipun begitu, naval diplomacy tetap dapat mencapai tujuan yang dapat dihitung atau diperhitungkan secara statistik, walaupun mencakup banyak hal dalam praktik diplomasi pertahanan kelautan”.
(Murfett).

Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa naval diplomacy ini juga diterapkan di berbagai wilayah dunia selain wilayah barat, mengingat kegunaan dan signifikansi atau output yang dapat dihasilkan tersebut. Cina, adalah salah satu negara yang mencapai *tangible result* atau pencapaian objektif dan dapat diperhitungkan secara statistik pada tahun

(1994). (Newport, Rhode Island: Naval War College Press, 2007).

2008 dari penerapan praktik diplomasi pertahanan di wilayah maritim dengan naval diplomacy, karena pada saat itu Cina dapat mengirimkan dua kapal pendukung untuk wilayah Teluk Aden untuk melawan konflik yaitu pembajakan laut yang ada di wilayah tersebut (Yoshira, dkk).

Penyebaran kapal tersebut, dianggap oleh berbagai standar negara Barat, sebagai kemampuan Cina untuk mengoperasikan alat perang dan kemampuan militernya, yang menakjubkan juga beyond its capability. Hal ini juga dinyatakan oleh berbagai peneliti dari Institut Studi Maritim Cina yang ada di US Naval College, yang menemukan hasil dari penelitiannya bahwa terjadi lonjakan minat Cina untuk mengembangkan kemampuan militer dan maritimnya dan adanya teori sea power yang diutilisasi oleh Cina – yang dikemukakan oleh Mahan – sehingga Cina akhirnya juga gencar mengembangkan aspek pertahanannya. Lonjakan minat ini juga dilihat di berbagai negara Asia lainnya seperti India yang pada saat itu juga mulai untuk mengekspansi kemampuan maritimnya; yang juga untuk menunjukkan eksistensinya secara global di wilayah kemaritiman negara masing-masing (Yoshira, dkk).

Pada penelitian ini, di bagian definisi mengenai naval diplomacy, dipaparkan bahwa naval diplomacy adalah konsep diplomasi pertahanan di wilayah kemaritiman yang berbeda dari konsep maritime diplomacy, karena naval diplomacy juga melibatkan non-state actors di dalam praktiknya. Bagian ini akan memaparkan keterlibatan non-state actors tersebut di dalam praktiknya, yaitu seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan US Fourth Fleet yang dimilikinya. Pada saat itu, seperti yang dituliskan oleh Michael Quigley dalam prosidingnya:

“Pada Mei 2008, angkatan perang Amerika Serikat meninjau ulang dan membentuk kembali US Fourth Fleet, yang sudah terbengkalai kurang lebih selama 60 tahun, dan akhirnya membuat

kembali operasi angkatan laut yang ada di Karibia dan Amerika Latin. Ini dilakukan untuk meraup kembali kekuatan otoritas Amerika Serikat dan kekuatan strategisnya, diplomasinya, dan kepentingan politik Amerika Serikat yang memiliki hubungan internasional dengan Amerika Latin. “Sinyal” ini dikirimkan oleh Amerika Serikat tidak hanya kepada Hugo Chavez, Presiden Venezuela, akan tetapi juga ke seluruh pemimpin negara yang ada pada kawasan tersebut, terutama negara yang bermusuhan dengan Amerika Serikat.”
(Quigley, 2009).

Penjelasan mengenai “sinyal” tersebut merupakan hal yang menandakan bahwa naval diplomacy adalah praktik diplomasi yang juga melibatkan komunikasi di antara aktor-aktor yang tidak hanya state tetapi juga non-state actors (Widen, 2011). Proses pemberian “sinyal” ini juga dilakukan oleh Korea (Mandel, 1986).

Dalam contoh kasus yang ada di Korea, penyebaran kapal dan angkatan perang Amerika Serikat merupakan hal yang menjadi bagian dari usaha untuk mengekspansi praktik diplomasi dari Amerika Serikat itu sendiri. Akan tetapi, Amerika Serikat tetap berusaha untuk tidak terlalu provokatif dalam mengoperasikan kekuatan militernya di

berbagai wilayah laut yang berdekatan dengan Cina atau Korea Utara, karena dapat menimbulkan resiko yang besar terhadap wilayah perairan teritorial diperebutkan.

Sehingga, ada sebuah “sinyal” tersendiri yang sudah jelas di sini baik bagi negara yang menjadi sekutu maupun musuh dari Amerika Serikat, untuk tidak menimbulkan aksi provokatif di wilayah-wilayah laut atau maritim yang bersinggungan karena akan menimbulkan resiko perang yang lebih tinggi, dan juga menimbulkan beberapa resiko lain yang tentunya masih belum dapat diprediksi.

Hal inilah yang menunjukkan bahwa naval diplomacy juga merupakan konsep yang sangat melibatkan tata bahasa dan aksi-aksi simbolik untuk melancarkan

praktiknya. (Mandel, 1986 & Rowlands, 2012). Selain itu, naval diplomacy juga dilakukan dalam bentuk kerja sama Korea Selatan dan Amerika Serikat dengan mengadakan pelatihan militer bersama.

Pentingnya Penerapan *Naval Diplomacy* dalam Diplomasi Pertahanan

Penerapan naval diplomacy, seperti yang sudah beberapa kali dijelaskan di atas, sangat penting dalam peranannya terutama pada proses dan praktik diplomasi pertahanan maritim. Hal ini disebabkan oleh naval diplomacy yang merupakan konsep diplomasi pertahanan di wilayah kelautan yang melibatkan banyak aktor dalam praktiknya, baik itu dari state actors, maupun non-state actors. Penerapan naval diplomacy ini juga penting untuk negara dalam proses pencapaian kepentingan nasionalnya (Nye, 2004 & Rowlands, 2015).

Pada dasarnya, konsep naval diplomacy ini seringkali disamakan dengan konsep gunboat diplomacy, akan tetapi menurut James Cable, gunboat diplomacy adalah konsep yang didahulukan dengan peristiwa atau insiden tertentu dalam proses atau praktik diplomasi pertahanan atau militer, dan identik dengan proses koersif. Namun, menurut Ian Speller, naval diplomacy ini merupakan konsep yang melibatkan aktivitas lebih luas daripada sekedar pemahaman menjaga keamanan internasional secara tradisional dengan kekuatan defensif atau ofensif militer yang koersif saja, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lain untuk menjinakkan lawan atau musuh (Cable, Speller, 2014).² Menunjang argumen ini, gunboat diplomacy sebagaimana yang dipaparkan oleh Cable hanya mengasumsikan hubungan bilateral yang berdasarkan aksi-reaksi. Model ini

² Cable, J. Sebagai contoh, membatasi studinya mengenai *gunboat diplomacy* sebagai studi yang hanya terbatas pada insiden-insiden koersif saja, yang memungkinkan adanya dan menghasilkan *gunboat diplomacy* sebagai bentuk diplomasi pertahanan. Namun, Ian Speller, memaparkan

diprakarsai oleh Cable dengan menunjukkan bahwa hubungan bilateral antarnegara dalam konteks diplomasi kelautan ini hanya melibatkan aktor penyerang atau *assailant* dan korban atau victim dalam penerapannya. Padahal, sistem dan realitas internasional terdiri dari berbagai hal yang lebih kompleks dari sekedar hubungan itu, banyak pemangku kebijakan yang terkait dalam setiap proses dan praktik diplomasi pertahanan yang dilakukan. Oleh karena itu, naval diplomacy sebagai konsep pembaharuan dari gunboat diplomacy, ada untuk melengkapi hal tersebut—agar dapat menjelaskan relasi antaraktor yang terlibat dalam proses diplomasi pertahanan, bukan hanya negara penyerang dan negara korban; namun dalam proses mengidentifikasi berbagai aktor yang juga masuk dalam proses dan praktik diplomasinya. Hal ini juga menjadi penting bagi naval diplomacy untuk diterapkan (Rowlands, 2015).

***Naval Diplomacy* di Indonesia**

Upaya penerapan naval diplomacy di Indonesia dalam penelitian ini akan dibahas dengan operasionalisasi konsep yang ada pada naval diplomacy di atas yakni presence, coercion (dalam bentuk deterrence atau compellence), picture building, dan coalition building.

Pada dasarnya, upaya Indonesia untuk melakukan naval diplomacy di wilayah Laut Cina Selatan ini, dilakukan dengan cara defensif, karena Indonesia memiliki pertimbangan angkatan militernya yang belum semumpuni Cina untuk melakukan upaya ofensif di wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, upaya naval diplomacy yang ada dari Indonesia ini, diterapkan dengan cara defensif disebabkan

bahwa *naval diplomacy* merupakan konsep yang lebih luas dan lebih dapat digunakan untuk menjinakkan lawan karena melibatkan aktor selain negara: Speller, I. (2014). *Understanding Naval Warfare*. (Abingdon: Routledge) pp. 76; Cable, J. *Gunboat Diplomacy*, 3rd Ed. pp. 3.

oleh kompleksnya wilayah Laut Cina Selatan yang disengketakan oleh berbagai negara yang terlibat, sehingga Indonesia tidak ingin menimbulkan perang yang tentunya menghasilkan cost lebih besar (Paramasatya & Poespojoedho, 2019). Penerapan naval diplomacy di Indonesia terutama terhadap di wilayah Laut Cina Selatan ini, belum berjalan sepenuhnya efektif karena tidak memenuhi keseluruhan aspek atau indikator prosesual yang ada pada naval diplomacy itu sendiri, meskipun pada dasarnya akan menimbulkan respon positif tidak hanya dari Cina, tetapi juga respon positif dari dunia internasional (Paramasatya & Poespojoedho, 2019).

Pada aspek presence, kehadiran angkatan laut sebagai salah satu alat dalam naval diplomacy di Indonesia, masih dilakukan secara tumpang tindih karena kegiatan yang dilakukan untuk membuat angkatan laut itu “hadir” dalam proses naval diplomacy, dilakukan dengan tujuan dan cara.

Menurut Till (2009) setelah adanya presence, akan ada aspek coercion building, yang mana dapat dipenuhi jika aspek presence tersebut benar-benar dipenuhi oleh Indonesia. Fungsi ini merupakan fungsi-fungsi yang memiliki sifat prosesual, berlanjut, dan saling melengkapi; namun di satu sisi, fungsi naval diplomacy yang ini juga dapat menyebabkan strategi pertahanan maritim di Indonesia berjalan tidak sesuai dengan objektif atau tujuannya karena harus memastikan fungsi-fungsi ini berjalan terlebih dahulu dari satu fungsi atau aspek ke aspek yang lainnya. Sehingga, keberadaan angkatan laut yang direpresentasikan oleh TNI-AL dalam proses diplomasi pertahanan maritim Indonesia, harus dipastikan terlebih dahulu sehingga proses ini akan berjalan dengan sebagaimana mestinya; tidak menjadi proses yang sia-sia.

Tahapan berikutnya yaitu picture building, direpresentasikan oleh TNI-AL, Indonesia seharusnya dapat membuat image yang kuat dalam proses diplomasi

pertahanannya. Selain itu, dalam konteks diplomasi, tidak hanya membangun image yang kuat, tetapi Indonesia juga seharusnya dapat membangun citra untuk menjadi lembut karena ini adalah proses diplomasi yang akan menghasilkan bentuk kerja sama. Hal ini juga belum ditemukan dalam proses diplomasi pertahanan maritim dalam konteks naval diplomacy yang ada di Indonesia, karena seperti yang telah disebutkan di atas bahwa, Indonesia hanya berusaha untuk menunjukkan citra “kuat” nya saja dalam mempertahankan wilayah maritimnya atas klaim Cina di tahun 2020 ini, dengan menentang keras Cina, mengajukan langsung nota diplomatik kepada PBB pada tahun 2020 (Felix, 2021). Padahal, dalam hal ini, Indonesia sebaiknya bertindak calming-down agar dapat bertindak secara logis dan netral sehingga dapat juga menghasilkan citra negara yang baik dan tidak keras dalam kancah internasional, guna melancarkan upaya naval diplomasi nya di Laut Cina Selatan pada tahun 2020 ini (Channel News Asia, 2021).

Beranjak ke aspek berikutnya yaitu coercion, yang menyatakan bahwa meskipun naval diplomacy juga melibatkan unsur-unsur non-strategis negara dan militer yaitu non-state actors, namun dalam penerapannya naval diplomacy ini juga masih tetap melibatkan unsur militer yang bersifat koersif. Merujuk pada penjelasan sebelumnya bahwa upaya naval diplomacy yang ada di Indonesia masih cenderung mengedepankan upaya defensif daripada ofensif karena pertimbangan kapabilitas militer atau kekuatan militer yang Indonesia punya, pada akhirnya, di tahun 2020 ini, Indonesia juga belum mampu untuk mengerahkan upaya ofensif yang biasanya erat kaitannya dan identik dengan upaya-upaya koersif untuk mempertahankan wilayah kemaritimannya terutama di wilayah Laut Cina Selatan, menentang Cina. Upaya koersif juga masih sulit dilakukan oleh Indonesia karena Indonesia masih mempertimbangkan

dependensi terhadap Cina dari segi ekonomi (IISS, 2021).

Lebih lanjut, hal ini juga menjadi penghalang besar bagi Indonesia untuk melakukan serangan-serangan yang bersifat koersif tersebut mengingat Indonesia masih belum mumpuni dalam konteks kapabilitas militernya, juga ketergantungan perekonomian terhadap Cina. Hal yang dapat dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2020 ini yang dipicu oleh ketegangan di Laut Natuna, adalah bahwa Indonesia hanya dapat memberikan *deterrence* yang sifatnya defensif saja tanpa mengerahkan kekuatan militer: dengan mengajukan nota diplomatik kepada PBB bahwa Indonesia mengecam klaim wilayah yang dilakukan oleh Cina pada tahun 2020 ini di wilayah yang bersinggungan juga dengan ZEE Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan naval diplomacy oleh Indonesia terhadap Cina atas konflik dan ketegangan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dalam tataran praktisnya belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan oleh aspek-aspek dari naval diplomacy atau indikator-indikator yang ada di dalamnya, sebagai konsep yang prosesual, tidak dapat dipenuhi sepenuhnya di tahun 2020 ini. Dua sebab utama dari ketidakmampuan Indonesia untuk menerapkan naval diplomacy sebagai strategi pertahanan yang efektif adalah disebabkan oleh dua aspek utama yang ada dalam aktivitas internasional: keamanan dan ekonomi. Dari segi keamanan, Indonesia belum memiliki kapabilitas militer yang mumpuni jika dibandingkan dengan Cina, untuk melakukan indikator coercion dalam praktik naval diplomacy, sehingga akhirnya Indonesia hanya melakukan upaya defensif saja. Kemudian, dari aspek ekonomi, Indonesia juga belum dapat melakukan, mengencangkan, dan melaksanakan upaya koersif tersebut karena kondisi perekonomian Indonesia, yang masih banyak bergantung pada Cina. Akhirnya,

hal ini masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Indonesia, untuk menerapkan naval diplomacy sebagai strategi diplomasi pertahanan maritime yang lebih efektif untuk mengatasi konflik, perselisihan, dan juga ketegangan di wilayah-wilayah laut Indonesia. Setidaknya, seharusnya pekerjaan rumah tersebut dapat dilakukan oleh Indonesia dengan melakukan langkah kecil terlebih dahulu, yaitu melihat lagi berbagai kebijakan publik terkait yang sudah ada. Mengingat, apabila melihat definisinya, kebijakan publik adalah suatu program yang dirancang dan diproyeksikan dengan tujuan, nilai, dan praktik tertentu (Howlet & Ramesh, 1995, dalam Hidayat, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Tesis

- Agastia, I Gusti Bagus Dharma, 2016. *Maritime Security in the Indo-Pacific*, 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aminah, S. (2016). The Role Of Government To Eradicate Radicalism and Terrorism In Indonesia. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 4(01), 83-101. Retrieved from [https://jurnal.balitbangda.lampungrov.go.id/index.php/jip/article/view/11](https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/11)
- Andika, M. T. (2016). An Analysis of Indonesia Foreign Policy under Jokowi's Pro-People Diplomacy. *Indonesian Perspective* 1(2), pp. 93-105.
- Bela, P. S. (2020). Repositioning Indonesia In the Changing Maritime Landscape of the Indo Pacific Region, *Global: Jurnal Politik Internasional*, 22(1). pp. 1-25.

- Butler, Colin J. (2005) Strategic Alliance UK, Journal, Jan – Feb Edition. Strategic.
- Cable, J. (1991). Gunboat Diplomacy, 3rd Ed. pp. 3; Jane's Defence Weekly (JDW) 15, (2). Change 14: 20–22
- Cresswell, J. W. (2014). Research Design, Qualitatives, Quantitative, and Mixed. Methods Approaches (4th Edition). United States of America: Sage.
- Djalal, H. (1979). Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut. Bandung: Percetakan Ekonomi.
- Djalal, H. (2003). Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Lessons Learned. Jakarta: The Habibie Center.
- Fajrina, A. N., & Roziqin, A. (2020). Geopolitical Studies of the South China Sea: Data and Analysis of Social Media. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 8(2).
- Flournoy, M., & Brimley, S. (2009). The Contested Commons, US Naval Institute Proceedings, no.7 (2009): pp.20.
- Forward..from the Sea (1994). (Newport, Rhode Island: Naval War College Press, 2007). Grove, E. The Discovery of Doctrine, dalam Till, The Development of British Naval Thinking, pp. 187.
- Habir, D., Ahmad, et.al. (2014). Normative Priorities and Contradictions in Indonesia's Foreign Policy: From Wawasan Nusantara to Democracy. Australia: National Security College Issue Brief.
- Hidayat, T. (2018). Policy of Natural Resources Management in Good Governance Perspective. Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan, 6(02), 149-156. Retrieved from <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/93> .
- Howlett, Michael & Ramesh, M. (1995). "Policy Sciences and Political Sciences", dalam Studying Public Policy: Policy Cycle and Policy Subsystem. Toronto: Oxford University Press.
- Ilmi, N. (2020). Dampak Penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Tiongkok. Journal of International Relations. 6(4), pp. 482-490.
- Kartika, A. (2019). Indonesia's Image from China's Perspective on South China Sea Dispute (A Preliminary Study on China's Perception on Indonesia.). Global: Jurnal Politik Internasional, 21 (2). Pp.176-197.
- Kusumaatmadja, M. (1978). Bunga Rampai: Hukum Laut. Bandung: Bina Cipta.
- Liou, To-hai. (2001). North Korea's Diplomatic Strategies in the Post-Cold War Era: Fishing in Troubled Waters. International Journal of Korean Unification Studies, 10(2). Pp.79
- Mahan, A. T. (1987). The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783. Dover Publication. Malik, M. (2014). Maritime Security in the Indo-Pacific: Perspectives from China, India, and the United States. London: Rowman & Littlefield.
- Mandel, R. (1986). The Effectiveness of Gunboat Diplomacy, International Studies Quarterly, 30. pp. 59-76.
- Murfett, Malcolm. Gunboat Diplomacy, pp. 85-86.

- Nye, Joseph, S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs; Nye, Joseph S. (2007). *Understanding International Conflicts*, 6th Ed. Harlow: Pearson Longman.
- Paramasatya, S., & Poespojoedho, W. W. (2019). Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 245. DOI: <https://doi.org/10.20473/jhi.v12i2.14027>.
- Quigley, Michael J. (2009). *Ships of State*. USNI Proceedings, 137, no. 7 (2009): pp. 57. Robertua, V. (2016). *Dinamika Konflik Laut Tiongkok Selatan: Confidence-Building Measures vs Hukum Internasional*, Verity, 232-252.
- Robertua, V., & Sinaga, O. (2017). *Indonesia in the South China Sea Dispute: Humble-Hard Power*. *Global Strategis*, 11(2), 73-83.
- Rowlands, K. (2012). *Decided Preponderance at Sea: Naval Diplomacy in Strategic Thought*, *Naval War College Review*, 65(4), pp.1-14.
- Rowlands, K. (2015). *Naval Diplomacy in the Post-Cold War Global Order*, PhD Thesis: King's College London: London.
- Sargent, R. (2000). *Deliberate Force Combat Air Assessments*. Dalam Owen, Robert, C. *Deliberate Force: A Case Study in Effective Air Campaigning*. Maxwell, AI: Air University Press.
- Singh, A. (2012). *South China Sea Dispute: Regional Issue, Global Concern*, *Maritime Affairs, Journal of the National Maritime Foundation of India*, 8(1), pp. 117-118. The Naval Policy Book (1992). *From The Sea* (1992).
- Till, G. (2009). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century* (2nd edition). London: Routledge.
- Widen, J. J. (2011). *Naval Diplomacy – a Theoretical Approach*. *Diplomacy and Statecraft*, 22(4). Pp. 715-733.
- Yoshihara, Toshi & Holmes, James. *Red Star over the Pacific: China's Rise and the Challenge to US Maritime Strategy*. (Annapolis: Naval Institute Press). pp. 149.
- Sumber Internet
<https://www.iiss.org/blogs/research-paper/2020/12/chinas-rise-as-a-global-security-actor> “China's Rise as A Global Security Actor: Implications for NATO”, diakses pada 11 Januari 2021.
- <https://theconversation.com/why-indonesias-aggressive-stance-on-china-in-south-china-sea-may-fall-short-143536> “Why Indonesia's aggressive stance on China in South China Sea may fall short?” Chang, Felix. diakses pada 10 Januari 2021.
- <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/indonesia-china-south-china-sea-united-nations-12847188> ”Why Indonesia is reaffirming its position on the South China Sea and turning down China's offer for bilateral talks?” diakses pada 11 Januari 2021.
- <https://www.iiss.org/publications/the-military-balance> “The Military Balance”, diakses pada 11 Januari 2021.

<https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/South-China-Sea/US-rejects-China-s-nine-dash-line-in-South-China-Sea> “US rejects China’s nine dash line in South China Sea” Moriyasu, Ken., Khan, Wajahat. diakses pada 10 Januari 2021.

<https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/South-China-Sea/Indonesian-navy-makes-show-of-force-in-South-China-Sea> “Indonesian navy makes show of force in South China Sea”, Jibiki, K. diakses pada 10 Januari 2021.

<https://www.fpri.org/article/2020/01/the-next-front-china-and-indonesia-in-the-south-china-sea/> “The Next Front: China and Indonesia in the South China Sea”, diakses pada 10 Januari 2021.

Xinhua. (2015). *China’s Deep-Sea Sub Explores Indian Ocean Seabed*. http://www.xinhuanet.com/english/china/2015-01/02/c_133892691.htm diakses pada Minggu, 10 Januari 2021.

Yescombe, E.R. (2007). *Public Private Partnership : Principles of Policy and Finance*. 1th Edition. Oxford. Elsevier Ltd, hlm 5.

Halaman Kosong